**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Ketahanan pangan berbeda dengan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup berarti terpenuhinya pangan yang cukup, bukan hanya beras melainkan juga mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan Suryana, (2003). Ketahanan pangan bukanlah swasembada pangan. Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif Hanani, (2009). Ketahanan pangan merupakan satu kesatuan utuh atas dimensi ketersediaan, aksebilitas, dan stabilitas harga pangan (Arifin, 2005). UU No 18 tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Penyelenggaran SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya (Kementan 2010).

SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM Bidang Ketahanan Pangan disusun sebagai pedoman/acuan bagi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan. Analisis SPM menggunakan indikator – indikator SPM bidang ketahanan pangan dan beberapa aspek terkait. SPM bidang ketahanan pangan memiliki 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan; serta penanganan kerawanan pangan. Indikator–indikator yang digunakan disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* 2015 (Kementan 2010).

 Kabupaten Pandeglang harus dapat dijadikan modal dalam membangun subsektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pandeglang. Sebagai daerah agraris karena meliputi areal 52.596 Ha lahan sawah (19,15%) dari total luas lahan Kabupaten Pandeglang yaitu 274.690 Ha. Dan 239.731 Ha lahan (87,27%) diantarannya digunakan untuk usaha pertanian seperti persawahan (52.596 Ha), ladang, kebun, empang, kolam tambak, kolam/tambak/empang, lahan untuk tanaman hutan rakyat dan negara. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput, lahan yang sementara tidak diusahakan dengan pantai sepanjang 230 km merupakan daerah kawasan agrokultural. (Sumber: BPS Pandeglang 2015).

* 1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah. Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka ditarik beberapa masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang?
2. Faktor apa saja yang menghambat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pandeglang?
	1. **Maksud dan Tujuan Penelitian**
		1. **Maksud**

Mempelajari situasi ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang tahun 2016 berdasarkan indikator ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan.

* + 1. **Tujuan**

Mengkaji pencapaian SPM Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang selama tahun 2016 mengacu pada Permentan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

* 1. **Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Dapat mengetahui sejauh mana keseriusan Pemerintah Daerah dalam menerapkan standar pelayanan minimal tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pandeglang.
2. Dapat dijadikan sebagai sumber literatur bagi peneliti selanjutnya.
	1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran penelitian ini mengambarkan dan menganalisis implementasi dari peraturan pemerintah no 65 tahun 2010 tentang standar pelayanana minimal (SPM) bidang ketahanan pangan di kabupaten pandeglang. Standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan terdiri dari beberapa bidang diantaranya adalah Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Penanganan Kerawanan Pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Oleh karena terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Dalam penyelenggaran ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan: a. memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; b. meningkatkan motivasi masyarakat; c. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; d. meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

* 1. **Hipotesis**
1. Diduga Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
2. Diduga tidak ada faktor penghambat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pandeglang.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

* 1. **Ketahanan Pangan**

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang pangan no 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

* 1. **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM bidang ketahanan pangan memiliki 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu Ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan (Kementan 2010).

Penyelenggaran SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya. Indikator kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang ketahanan pangan yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak di penuhi dalam pencapaian SPM bidang ketahanan pangan di Provinsi dan kabupaten/kota berupa masukan proses, hasil, dan atau manfaat pelayanan.

* + 1. **Ketersediaan dan Cadangan Pangan**

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan Pangan (Kementan 2010). Salah satu indikator dari pencapaian SPM pada suatu daerah adalah cadangan pangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan
cadangan pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita, dan indikator penguatan cadangan pangan. Indikator yang digunakan adalah apabila penguatan cadangan pangan mencapai 60% pada tahun 2015.

* + 1. **Distribusi Pangan dan Akses Pangan**

Distribusi pangan. Distribusi pangan adalah suatu kegiatan yang berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau (Kementan 2010).

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan umumnya bersifat kronis yang meliputi aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Aspek fisik berupa infrastruktur jalan dan pasar, dan aspek ekonomi berupa daya beli yang masih rendah karena kemiskinan dan pengangguran, serta aspek sosial berupa tingkat pendidikan yang rendah (Bappenas 2010). Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan, dan indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan. Indikator yang digunakan adalah apabila ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan di daerah telah mencapai 100% pada tahun 2015.

* + 1. **Penganekaragaman dan Keamanan Pangan**

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Menurut Hardinsyah dan Martianto (1992), konsumsi pangan adalah suatu informasi mengenai jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu. Pengertian penganekaragaman pangan dilihat dari dua aspek, yaitu 1) penganekaragaman horizontal (upaya untuk menganekaragamkan konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan dan upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas) dan 2) penganekaragaman vertikal, (upaya untuk mengolah komoditas pangan, terutama non beras, sehingga mempunyai nilai tambah dari segi ekonomi, nutrisi maupun sosial). Penganekaragaman pangan dapat dilihat melalui skor pola pangan harapan (PPH). Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah.

Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan *foodborne disease*, yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan atau senyawa beracun atau organisme patogen. Penyakit semacam ini masih sering terjadi di Indonesia. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh pangan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu infeksi dan intoksifikasi istilah infeksi digunakan bila setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang mengandung bakteri patogen, timbul gejala-gejala penyakit. Intoksifikasi adalah keracunan yang disebabkan karena mengonsumsi pangan yang mengandung senyawa beracun (Anwar 2006).

Dua hal dalam aspek keamanan pangan yang menjadi penyebab permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, yaitu: (1) residu pestisida pada beberapa produk pertanian yang sudah melampaui batas toleransi, dan meninggalkan residu di atas ambang batas maksimum, baik pada produk maupun pada lingkungan usaha tani; dan (2) perilaku produsen makanan jajanan (banyak yang belum terdaftar), yang dalam proses produksinya belum menggunakan standar yang ditetapkan, bahkan kadang menggunakan zat pengawet, zat pewarna, dan zat pemanis buatan yang tidak sesuai ketentuan. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan keracunan pada makanan, bahkan dapat menjadi salah satu penyebab Penyakit Bawaan Makanan atau PBM (*food bornedisease*) bagi konsumen (DKP 2011). Indikator yang digunakan adalah apabila pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat mencapai 80% pada tahun 2015, maka pencapaian nilai SPM telah sesuai.

* + 1. **Penanganan Kerawanan Pangan**

Secara umum, kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kondisi kerawanan pangan dapat bersifat: (1) kronis, yang ditampakkan dengan adanya gejala kurang makan secara terus menerus karena ketidak mampuan memperoleh pangan yang cukup, baik cara membeli atau menghasilkan sendiri, akibat keterbatasan penguasaan sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya manusia sehingga pemanfaatan kemampuan dan kekuatan fisik kurang maksimal; menjadikan rentan terhadap gangguan penyakit, dan pada gilirannya menyebabkan kondisi masyarakat semakin miskin; (2) kerawanan trasien, yang merupakan penurunan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, akibat kondisi tidak terduga seperti ketidakstabilan harga, ketidakstabilan produksi, dan ketidakstabilan pasokan pangan sebagai akibat bencana alam, kerusuhan, penyimpangan musim, konflik sosial, dan lain-lain (BBKP 2003).

Tingginya proporsi rumah tangga rawan pangan dan anak balita kurang gizi menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan pada tingkat nasional atau wilayah tidak selalu berarti bahwa tingkat ketahanan pangan pangan di rumah tangga dan individu juga terpenuhi. Masalah-masalah distribusi dan mekanisme pasar yang berpengaruh terhadap harga, daya beli rumah tangga yang berkaitan dengan kemiskinan dan pendapatan rumah tangga, dan tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi sangat berpengaruh kepada konsumsi dan kecukupan pangan dan gizi rumah tangga (DKP 2009). Kurang beragamnya pangan yang dipilih dan tidak cukupnya jumlah yang dikonsumsi merupakan masalah konsumsi pangan dan gizi yang sering terjadi. Indikator yang digunakan adalah apabila penanganan daerah yang mengalami rawan pangan mencapai 60 pada tahun 2015, maka pencapaian nilai SPM telah sesuai (Kementan 2010).

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Waktu dan Tempat Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mengolah data sekunder yang berkaitan dengan indikator – indikator SPM dan diperoleh dari instansi–instansi terkait di lingkungan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

**Tabel 1: Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** |  |  |  | **Waktu Penelitian**  |
| **2016** |  |  |  | **2017** |
| **Okt** | **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** | **Mei** | **Jun** | **Jul** | **Ags** |
| 1 | Pengajuan Judul Tesis |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 2 | Penyelesaian dan Bimbingan Proposal Tesis |   |   |   |   |
| 3 | Seminar Usulan Penelitian |   |   |   |   |
| 4 | Revisi Proposal Tesis |
| 5 | Penelitian |   |   |
| 6 | Penyelesaian dan Bimbingan Tesis |   |   |  |  |  |
| 7 | Sidang Tesis |   |  |  |  |

* 1. **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan menggambarkan situasi ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai intansi terkait. Jenis dan sumber data yang akan digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2: jenis dan sumber data yang digunakan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator SPM** | **Jenis Data** | **Tahun Data** | **Sumber Data** |
| ketersediaan dan cadangan pangan | Ketersediaan Energi dan Protein per-kapita | Neraca Bahan Makanan (NMB) Kab. Pandeglang | 1 Tahun terakhir 2016 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang |
| Penguatan Cadangan Pangan | Data Stok Pangan di Kab. Pandeglang | 1 Tahun terakhir 2016 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Bulog Kab. Pandeglang |
| Distribusi dan Akses Pangan | Ketersediaan Informasi Harga Pasokan dan Akses Pangan di Daerah | Data Informasi Kelembagaan | 1 Tahun terakhir 2016 | Bappeda Biro PerekonomianKab. Pandeglang |
| Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan | Data dan Informasi Harga Pangan Strategis  | 1 Tahun terakhir 2016 |
| Penganekaragaman dan Keamanan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan/PPH | Data Konsumsi Pangan | 1 Tahun terakhir 2016 | BPS Kab. Pandeglang |
| Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | Data Presentase Pangan Aman dan Data Kasus Keamanan Pangan | 1 Tahun terakhir 2016 | BKPP dan Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang |
| Penanganan Kerawanan Pangan  | Penanganan Daerah Rawan Pangan | Daerah Rawan Pangan | 1 Tahun terakhir 2016 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Pandeglang |

 Jenis pelayanan ketahanan pangan dilihat berdasarkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan serta penanggulangan kerawanan pangan. Variabel ketersediaan dan cadangan pangan yang digunakan berupa Neraca Bahan Makanan (NBM) dan cadangan pangan Kabupaten Pandeglang selama tahun 2016. Variabel distribusi dan akses pangan dilihat berdasarkan ketersediaan bahan pangan di pasar, harga dan sarana prasarana dalam mendapatkan bahan pangan serta stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Pandeglang. Variabel penanekaragaman dan keamanan pangan menggunakan data berupa skor PPH untuk penganekaragaman pangan. Data keamanan pangan diperoleh dari data keracunan makanan selama satu tahun terakhir di Kabupaten Pandeglang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah hasil operasi pasar dan uji keamanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Variabel penanganan kerawanan pangan dilihat dari peta ketahanan dan kerawanan pangan Kabupaten Pandeglang selama tahun 2016.

**Tabel 3: Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pelayanan**  |  | **Indikator** |  | **Output** |
| Ketersediaan dan Cadangan Pangan | 1. Ketersediaan Energi dan Protein per-kapita | 1. Pemenuhan hak akses pangan: a. Ketersediaan Informasi Harga dan Pasokan dan b. Stabilitias Harga dan Pasokan |
| 2. Penguatan Cadangan Pangan |
| Distribusi dan Akses Pangan | 1. Ketersediaan Informasi Harga Pasokan dan Akses Pangan di Daerah | Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan status gizi yang baik |
| 2. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan | Ketahanan Pangan Nasional |
| Penganekaragaman dan Keamanan Pangan | 1. Skor Pola Pangan Harapan/PPH | Terpenuhinya Target MDGs  |
| 2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan |
| Penanganan Kerawanan Pangan | 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan |

* 1. **Pengumpulan Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Saifuddin Azwar 2005, data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya, sedangkan data sekunder adalah semua data yang diperoleh oleh pengumpul data secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Untuk mengumpulkan data tersebut digunakan beberapa cara, yaitu:

* + 1. **Observasi**

Metode observasi menurut Burhan Bungin 2007 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera baik mata maupun panca indera yang lainnya. Dengan kata lain, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti langsung berkodinasi dengan Instansi pemerintah Kabupaten Pandeglang yang ada hubungannya dengan data Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk meminta data ketersedian dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan tahun 2016.

* + 1. **Dokumentasi**

Menurut Basrowi dan Suwandi 2008, metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mendukung dalam penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk meneliti benda-benda tertulis, laporan-laporan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang dimiliki Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentang SPM bidang ketahanan pangan tahun 2016.

* + 1. **Wawancara**

Menurut Saifuddin Azwar 2005, pengumpulan data dengan wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan dan juga dijawab secara lisan. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang tahun 2016.

* + 1. **Analisis Data**

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan. Indikator yang digunakan dalam analisis ini dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4: Indikator SPM Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota**

|  |
| --- |
| **SPM** |
| **Jenis Pelayanan Bid. Ketahanan Pangan** | **Indikator**  | **Acuan Baku** | **Target Capaian 2016 (%)** | **Sumber Data** |
| ketersediaan dan cadangan pangan | Ketersediaan Energi dan Protein per-kapita | WNPG (Energi 2200 kkal dan Protein 57 g) | 90% | Dinas Pertanian dan Bappeda Kab. Pandeglang |
| Penguatan Cadangan Pangan | 100 Ton | 60% |
| Distribusi dan Akses Pangan | Ketersediaan Informasi Harga Pasokan dan Akses Pangan di Daerah | 100% | 90% | Bappeda Kab. Pandeglang |
| Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan | 100% | 90% |
| Penganekaragaman dan Keamanan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan/PPH | 100 | 90% | BKPP, BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang |
| Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 100% | 80% |
| Penanganan Kerawanan Pangan  | Penanganan Daerah Rawan Pangan  | 100% | 60% | BKPD |
| Sumber: Kementan 2010 |  |  |  |

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan**

 Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan (Bappenas 2008a). Ketersediaan pangan dalam negeri harus dijaga kestabilannya. Ketersediaan pangan diperoleh dari kegiatan produksi antara lain pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya.

**4.1.1 Ketersediaan Energi dan Protein per-kapita**

 Ketersediaan energi untuk konsumsi Kabupaten Pandeglang pada NBM tahun 2016 sebesar 5.899 kkalor/kapita/hari, hal ini menujukan bahwa tingkat ketersediaan energi melampui angka kecukupan energi berdasarkan hasil Widiya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, dengan tingkat ketersediaan terhadap AKE sebesar 245.79%. Penyediaan energi terbesar ada pada jenis bahan makanan padi-padian sebesar 4.635 kkalori/kapita/hari, dengan hanya jenis bahan makanan padi-padian maka tingkat ketersediaan energi Kabupaten Pandeglang sudah melampui AKE yaitu 193.1%. Ketersediaan protein untuk konsumsi Kabupaten Pandeglang pada NBM tahun 2016 sebesar 147.44 gram/kapita/hari. Tinggkat Ketersediaan Protein sudah jauh melebihi angka kecukupuan protein dengan tingkat AKP sebesar 175.52%, hal tersebut ditopang dengan padi-padian yang mencapai tingkat AKP sebesar 114.04% dari angka kecukupan protein nasional 84 gram/kapita/hari (AKP persedian/gizi energi makro).

**Tabel 5. Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak untuk Konsumsi perkapita/hari**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Kelompok Bahan Pangan** | **Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)** | **Tingkat AKE (%)** | **Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)** | **Tingkat AKP (%)** | **Ketersediaan Lemak (gram/kap/hari)** |
| 1 | Padi-padian | 4.635 | 193.13 | 114.04 | 135.76 | 21 |
| 2 | Umbi-umbian | 482.68 | 20.11 | 1.4 | 1.67 | 0.49 |
| 3 | Pangan Hewani | 152 | 6.33 | 17 | 20.24 | 8 |
| 4 | Minyak dan Lemak | 162.52 | 6.77 | 1 | 1.19 | 18 |
| 5 | Buah/biji berminyak | 87.65 | 3.65 | 1 | 1.19 | 8 |
| 6 | Kacang-kacangan | 58 | 2.42 | 6 | 7.14 | 2 |
| 7 | Gula | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sayuran dan buah | 316 | 13.17 | 7 | 8.33 | 2 |
| 9 | Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5.899 | 245.79 | 147.44 | 175.52 | 61.62 |

Keterangan: Angka Kecukupan Energi dan Protein: 2400 Kkal/kap/hari dan 84 gram/kapita/hari

**4.1.2.** **Penguatan Cadangan Pangan**

Indikator lain dalam ketersediaan dan cadangan pangan adalah penguatan cadangan pangan. Menurut SPM tahun 2010 adalah Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga, dan lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok. Cadangan pangan Kota/Kabupaten berdasarkan Permentan tahun 2010 adalah sebesar 100 Ekuivalen/Ton cadangan pangan.

**Gambar 1. Stok Cadangan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016**

Kabupaten Pandeglang belum memiliki cadangan, namun penguatan cadangan pangan yang dimiliki Kabupaten Pandeglang itu berasal dari cadangan pangan Masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tahun 2016 cadangan pangan Kabupaten Pandeglang sebanyak 86.305 Kg. Cadangan pangan Kabupaten Pandeglang dimanfaatkan untuk tiga aspek kebutuhan yaitu pada saat darurat, kerawanan pasca bencana, dan stabilitas harga.

**4.2. Distribusi dan Akses Pangan**

Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan yang berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai persaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau (Kementan 2010). Distribusi dan akses pangan dikaji menggunakan dua indikator, yaitu ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan serta stabilitas harga dan pasokan pangan.

**4.2.1.** **Ketersediaan Informasi Harga Pasokan dan Akses Pangan di Daerah**

 Nilai capaian ketersediaan informasi harga pasokan dan akses pangan Kabupaten Pandeglang bisa diketahui dari komoditas, lokasi dan waktu. Komoditas bahan pangan dapat diketahui berdasarkan ketersediaan informasi baik harga maupun pasokannya adalah sembilan komoditas utama, yaitu Beras, jagung, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, dan cabe merah. Waktu yang diperoleh setiap minggunya (52 Minggu). Nama lokasi yang dijadikan tempat untuk memantau harga yaitu Pasar Pandeglang, Menes, Labuan dan Panimbang.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **I** | **1=Harga** | **2=Pasokan** | **3=Akses** |
| **J** | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| 1 | Komoditas | 9 | 9 | 100 | 9 | 9 | 100 | 9 | 9 | 100 |
| 2 | Lokasi | 4 | 1 | 25 | 4 | 1 | 25 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | Waktu (Minggu) | 52 | 48 | 92.307 | 52 | 48 | 92.307 | 52 | 48 | 92.307 |
|   | Ki | 72.435 | 72.435 | 72.435 |
| Nilai Capaian Ketersediaan Informasi (K) | 72.435 |

**Tabel 6. Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan Tahun 2016**

Keterangan: Target komoditas yang dipantau ada 9 jenis, yaitu: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) bawang merah, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah.

Pencapaian standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan untuk indikator ketersedian informasi harga pasokan dan akses pangan di daerah, untuk Kabupaten Pandeglang tahun 2016 belum mencapai 90 % sesuai target indikator SPM yang sudah ditentukan. Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 telah mencapai nilai 72.43%, dengan jumlah 9 komoditas, target lokasi yang terealisasi hanya 1 lokasi dari target 4 lokasi, dengan jangka waktu 48 minggu.

**4.2.2. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan**

Stabilitas harga dan pasokan pangan dapat diketahui per-komoditas pangan berdasarkan inflasi harga dan pasokan pangan yang terdapat di Kabupaten Pandeglang. Harga bahan pangan di Kabupaten Pandeglang dapat diamati per-hari, per-bulan dan per-tahun. Harga bahan pokok (beras, gula pasir dan minyak goreng) di Kabupaten Pandeglang cenderung stabil selama tahun 2016. Capaian standar pelayanan minimal untuk Stabilitas harga dan pasokan pangan dapat dikatakan stabil jika gejolak harga yang terjadi di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi harga normal dan pasokan dikatakan stabil bila penurunan pasokan pangan disuatu wilayah berkisar antara 5-40%. Stabilitas harga dan pasokan dapat digambarkan dengan koefisien keragaman (CV) dari pangan. Koefisien keragaman dapat diperoleh dengan membagi standar deviasi harga pangan dengan harga rata-rata pangan lalu dikali 100. Stabilitas harga pangan di Kabupaten Pandeglang selama satu tahun 2016 adalah 9.39%.

**4.3.** **Penganekaragaman dan Keamanan Pangan**

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatkan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Penganekaragaman dan keamanan pangan diketahui dari data konsumsi pangan dan data keamanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Data konsumsi pangan diperoleh dari data SUSENAS Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Badan Pusat Statisik.

**4.3.1. Skor Pola Pangan Harapan/PPH**

Penganekaragaman dan keamanan pangan dapat diketahui dari data hasil konsumsi pangan di Kabupaten Pandeglang. Data konsumsi pangan diperoleh dari data SUSENAS Kabupaten Pandeglang, dan diukur dengan pola pangan harpan (PPH). Berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan, jumlah energy, protein, dan skor PPH konsumsi kabupaten tahun 2016 sebesar 2.099.4 kkal/kap/hari 97.6 AKE, protein 59.3 gr/kap/hari dengan jumlah angka kecukupan protein (AKP) sebesar 104.2, dan skor PPH 74.5. Hal ini menujukan bahwa pola makan penduduk Kabupaten Pandeglang tahun 2016 belum mencukupi secara kuantitas dan kualitas. Hasil analisis yang tersaji pada tabel 13 menujukan bahwa konsumsi pangan penduduk yang belum mencapai standar kecukupan gizi yaitu hampir semua kelompok pangan seperti umbi-umbian, pangan hewani, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Sementara itu, konsumsi padi-padian serta minyak dan lemak sudah melebih standar kecukupan gizi. Konsusmi padi-padian di Kabupaten Pandeglang tahun 2016 masih cukup tinggi yaitu sebesar 1.458.2 kkal/kap/hari atau setara dengan 340.7 gr/kap/har. Jumlah ini lebih banyak dari standar kecukupan gizi yaitu 1.100 kkal/kap/hari. Konsumsi umbi-umbian juga masih rendah dari standar kecukupan yang dianjurkan. Idealnya konsumsi umbi-umbian sebesar 132 kkal/kap/hari atau setara dengan 110 gram umbi perorang per-hari. Konsusmsi pangan hewani masih cukup rendah yaitu sebanyak 127.5 kkal/kap/hari atau setara dengan 95.1 gram/kap/hari, standar kecukupan energy untuk pangan hewani adalah 240 kkal/kap/har. Konsusmsi kacang-kacangan juga belum mencukupi yaitu hanya sekitar 47% dari standar kecukupan 51.1 dari 110 kkal/kap/hari. Konsumsi buah/biji berminyak di Kabupaten Pandeglang sangat rendah yakini berada pada 9.4 kkal.kap/hari dari standar kecukupan yang dianjurkan 66 kkal/kap/hari. Konsumsi sayur dan buah belum mencukupi angka kebutuhan ideal yakini berada pada kisaran 84% dari standar kecukupan 132 kkal/kap/hari, jumlah konsumsi sayur dan buah di Kabupaten Pandeglang hanya 110.2 kkal/kap/gram.

Konsumsi penduduk di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 sebesar 2.099.4 kkal/kap/hari (97.6% AKE) belum mencukupi ideal yaitu 2.150 kkal/kap/hari. Konsumsi protein penduduk Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2016 sudah mencapai skor ideal yaitu 59.3 gr/kap/hari (104.2 AKP) dari Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kap/hari. Sementara untuk skor PPH Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 adalah 74.5 yang menujukan bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk belum beranekaragam.

**4.3.2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

Keamanan pangan merupakan masalah penting karena diperkirakan lebih dari 90% masalah kesehatan manusia terkait dengan makanan. Berdasarkan data WHO tahun 2000 diketahui penyakit karena pangan (*foodborne disease*) merupakan penyebab 70% dari sekitar 1,5 milyar kejadian penyakit diare, dan setiap tahunnya menyebabkan 3 juta kematian anak berusia di bawah 5 tahun (Bappenas 2007). Parameter utama yang paling mudah dilihat untuk menunjukkan tingkat keamanan pangan di suatu negara adalah jumlah kasus keracunan yang terjadi akibat pangan (Bappenas 2007).

Target sempel baha pangan yang diuji sebanyak 200 sampel dan berhasil dilakukan pengujian terhadap seluruh target. Setelah dilakukan uji terhadap sampel, sempel yang aman untuk dikonsumsi sebanyak 175 sampel. Katagori sempel aman adalah sempel yang tidak kadaluarsa dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Data keamanan pangan diperoleh dari data pengawasan mutu dan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan. Peresentase pangan yang aman untuk dikonsumsi di Kabupaten Pandeglang dapat diperoleh dengan membagi jumlah pangan yang aman untuk dikonsumsi dengan total sempel yang diambil untuk diuji lalu dikali 100%. Dari 200 sempel pangan yang diuji kamanan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, sebanyak 175 sempel atau sebanyak 87% merupakan bahan pangan aman untuk dikonsumsi.

**4.4. Penanganan Kerawanan Pangan**

 Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Penduduk dikatakan rawan konsumsi energi apabila rataan konsumsi energinya kurang dari jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup aktif dan sehat (DKP 2009). Kerawanan pangan dan kelaparan sering terjadi pada petani skala kecil, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam yang miskin dan terdegradasi. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein (DKP 2006).

 Dalam kegiatan penanganan kerawanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten memberikan bantuan berupa bibit umbi-umbian, ternak kambing/domba, dan lumbung pangan masyarakat. Jumlah yang sudah ditangani pada tahun 2016 dalam kegiatan penanganan daerah rawan pangan yaitu 23 kelompok dengan daerah yang berbeda-beda. Presentase kerawanan pangan dapat dihitung menggunkan rumus, jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan dibagi jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai dengan standar yang berlaku lalu dikali 100. Tingkat capaian penangan daerah rawan pangan Kabupaten Pandeglang 38.3%.

**4.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolak ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai Permentan tahun 2010, standar pelayanan minimum (SPM) bidang ketahanan pangan. Target capaian indikator tersebut disesuaikan dengan target MDGs (*Millenium Development Goals*) 2015. Target dan capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang disajikan pada tabel 7.

**Tabel 7. Tingkat Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tahun 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator SPM Bidang Ketahan Pangan** | **Acuan Baku** | **Target Indikator Tahun 2015 (%)** | **Tingkat Pencapaian Indikator Tahunan 2016 (%)** |
| 1 | Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita | WNPG (Energi 2400 kkal dan Protein 84 g) | 90 | Energi: 245.79Protein: 175.52%TPI: 210.7 % |
| 2 | Penguatan Cadangan Pangan  | 100 Ton | 60 | 48  |
| 3 | Ketersedian Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan di Derah | 100% | 90 | 72 |
| 4 | Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan | 100% | 90 | 9.39 |
| 5 | Pencapaian Skor PPH | 100 | 90 |  74 |
| 6 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 100% | 80 | 87 |
| 7 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | 100% | 60 | 38 |

Berdasarkan data yang tersedia, tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tahun 2016 belum mencapi target. Selama tahun 2016, indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pandeglang yang telah mencapai target adalah Indikator Ketersediaan Energi dan Protein per-kapita dan Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Untuk Indikator Penguatan Cadangan Pangan, Indikator Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan Daerah, Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, Indikator Pencapaian Skor PPH, dan Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan belum mencapai Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan menurut Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Hasil dari kajian implementasi standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang tahun 2016 diantaranya adalah:

1. Tingkat ketersediaan energy dan protein Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 secara kuantitas sudah mencukupi angka rekomendasi hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012. Ketersediaan energy di Kabupaten Pandeglang pada NBM Tahun 2016 sebesar 5.899 Kkal/kap/hari dengan tingakat AKE (%) sebesar 245.79, hal ini berarti ketersediaan energy diatas rata-rata berdasarkan hasil (WNPG) tahun 2012 sebesar 2.400 Kkal/kap/hari. Ketersediaan Protein di Kabupaten Pandeglang pada NMB tahun 2016 diatas angka rata-rata ketersediaan protein berdasarkan hasil WNPG tahun 2012 sebesar 84 gram/kapita/hari.
2. Penguatan Cadangan Pangan Menurut SPM tahun 2010 adalah Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga, dan lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok. Stok cadangan pangan yang dimiliki Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 adalah cadangan pangan Masyarakat sebesar 86.305 Kg dari 17 kecamatan dan 17 kelempok. Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 belum memiliki stok cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, foktor yang mempengaruhi Kabupaten Pandeglang belum memiliki 100 ton cadangan pangan daerah adalah tidak adanya stok cadangan pangan, pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah menganggarkan melalui Dinas Ketahan pangan untuk membeli stok cadangan pangan, tetapi masalahnya adalah tidak adanya stok cadangan pangan sehingga anggaran yang sudah dianggarkan tidak teralisasi. Cadangan pangan yang dimiliki pada tahun 2016 juga belum mencapi Standar Pelayanan Minimal bidang ketahan pangan pada tahun 2010. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus SPM indikator penguatan cadangan pangan masyarakat, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 memiliki cadangan pangan sekitar 48.57 Kg, hal ini menujukan bahwa penguatan cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 belum mencapai target indikator tahun 2015 sebesar 60 %.
3. Distribusi Pangan adalah seuatu kegiatan yang berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai persaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau (kementan 2010). Hasil dari perhitungan untuk indikator ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 belum sesuai mencapai target indikator tahun 2015 sebesar 90 % yang sudah ditentukan. Target komoditas yang dipantau ada 9 jenis, diantaranya adalah: Beras, jagung, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, dan cabe merah. Jumlah target pasar besar yang akan dijadikan lokasi pemantauan 4 pasar, diantaranya adalah pasar pandeglang, pasar menes, pasar labuan, dan pasar panimbang. Target waktu yang sudah ditentukan 52 (minggu), tetapi dalam realisasi kegiatan pada tahun 2016 yang terelasisasi hanya 1 lokasi (pasar) dengan waktu 48 (minggu). Faktor yang mempengaruhi indikator ketersediaan inforamsi harga, pasokan, dan akses pangan di Kabupaten Pandeglang tahun 2016 tidak mencapai target indikator tahun 2015 pada SPM bidang ketahanan pangan tahun 2010 diantaranya: kurangnya Sumber Daya Manusia yang berada di Intansi pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang untuk melakukan kegiatan pemantauan dengan lokasi pasar yang berbeda-beda. Akses atau jarak lokasi pasar yang sudah ditentukan juga terlalu jauh, sehingga lokasi dan waktu yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan target.
4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan dapat diketahui per komoditas pangan berdasarakan inflasi harga dan pasokan pangan yang terdapat di Kabupaten Pandeglang. Harga bahan pangan di Kabupaten Pandeglang dapat diamati per hari, bulan, dan pertahun. Harga bahan pokok di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 cendrung stabil, tidak ada peningkatan harga yang signifikan. Faktor yang mempengaruhi indikator stabilitas harga dan pasokan pangan belum mencapai target SPM di tahun 2016 diantaranya harga dan pasokan pangan yang diamati terlalu sedikit, jumlah komoditas pada tahun 2016 berjumlah 9 komoditas dengan rata-rata komoditas bahan pokok yang setiap hari masyarakat kabupaten pandeglang konsumsi, sehingga hasil untuk SPM tahun 2016 sebesar 9.38 %, angka ini masih jauh dari SPM yang sudah ditentukan yaitu sekitar 90% target indikator.
5. Pola konsumsi penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 merupakan gambaran penduduk suatu wilayah dalam mengonsumsi jenis-jenis pangan pada kelmpok pangan tertentu. Secara detail pola konsumsi pangan dijabarkan menjadi pola konsumsi pangan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji beriminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Konsumsi penduduk diKabupaten Pandeglang pada tahun 2016 sebesar 2.099.4 kkal/kap/hari (97.7% AKE) belum mencapai ideal yakni 2.150 kkal/kap/hari. Konsumsi protein Kabupaten Pandeglang sudah mencapai ideal yaitu sebesar 59.3 gr/kap/hari (104.2% AKP) dari WNPG yang dianjurakan sebesar 57 gr/kap/hari. Sementara itu, skor PPH Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 adalah 74.5 yang menunjukan bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk belum beranekaragam. Faktor yang mempengaruhi pola konsusmsi masyarakat pandeglang belum beragam diantaranya kurangnya pengetahuan penduduk mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang seharusnya dapat dilakukan melalui peningkatan dan kesadaran pangan dan gizi. Minimnya pengetahuan keterampilan untuk mengolah pangan dan gizi melalui pendidikan formal dan informal, sehingga hasil untuk SPM tahun 2016 belum mencapai target yang sudah ditetapkan.
6. Aspek keamanan pangan menjadi salah satu terpenting dalam ketahanan pangan, dimana pangan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan didefinisikan sebagi kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tercemarnya biologis, kimia dan benda yang dapat mengganggu, merugiakan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pengawasan dan pembinaan keamana pangan yang dilakukan pemerintah kabupaten pandeglang pada tahun 2016 dengan kelompok semple jajanan sekolah, bahan makanan pangan segar, hasil olahan rumah tangga, dan hasil produk UMKM. Jumlah sempel yang terealisasi dilakukan pengujian pada tahun 2016 sebanyak 200 sempel diantaranya: 120 sempel jajanan sekolah dan 80 sempel olahan rumah tangga. Hasil uji yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pandeglang, 100 sempel aman untuk jajana sekolah, dan 75 sempel aman untuk olahan rumah tangga. Hasil dari indikator SPM bidang ketahanan pangan tahun 2016 untuk pengawasan dan pembinaan kemanan pangan sudah mencapai target 87 % dari target indikator SPM 80%.
7. Jumlah daerah rawan pangan di kabupaten pandeglang pada tahun 2016 berjumlah 15 kecamatan 60 Desa, dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pandeglang pada tahun 2016 yaitu memberikan berupa bantuan berbentuk Bibit umbi-umbian, Domba, dan lumbung Pangan Masyarakat kepada daerah kecamatan dan desa yang dinyatakan daerah rawan pangan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menekan wilayah daerah rawan pangan, sehingga bisa terbebas dari daerah rawan pangan. Jumlah daerah rawan pangan yang berada di kabupaten pandeglang pada tahun 2016 terlalu banyak, dan tidak sebanding dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten pandeglang. Tingkat capaian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pandeglang pada tahun 2016 hanya 38%, angka ini masih jauh dari angka yang sudah ditentukan dari target SPM sebesar 60%, sehingga hasil dari penangan daerah rwan pangan untuk tahun 2016 belum mencapai SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk indikator penanganan daerah rawan pangan.

**5.2. Saran**

1. Perlu kerjasam pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Intansi terkait dan swasta dalam merealisasikan cadangn pangan daerah.
2. Pengujian sempel keamanan pangan antara intansi sebaiknya dilakukan secara bersama dan menguji sampel yang sama sehingga tidak terjadi Inkronisasi informasi.
3. Daerah yang termasuk kedalam daerah rawan pangan hendaknya mendapatkan lebih dari pemerintah Kabupaten Pandeglang dan daerah yang telah tahan pangan tetap mendapatkan perhatian.
4. Indikator yang belum mencapai target sebaiknya menjadi prioritas sasaran kebijakan pemerintah dan instansi agar dapat mencapai target tahun 2017.